

# G30S/PKI

SEJARAH, INGATAN KOLEKTIF, DAN DINAMIKA

POLITIK INDONESIA

Replik Volume II 2026



# STRUKTUR KEPENGURUSAN

- Pembina : Mochammad Azhar, S.H., LL. M.
- Dewan Redaksi : Rizki, Dhiyaa Ulhaq  
MusyaffaKartika, Syauqina Fildzah Hanifa, Nor  
Chanifah Laila, Fildzah Shafa Ghani, Tiara  
Raudhatul Jannah, Sony Kusuma Wijayanto, Bening  
Fuziyyah Auliya Arifan, Fadilla Zahrah Maulidia
- Pemimpin Umum : Gola Arpanji Cahyono
- Wakil Pemimpin Umum : Callysta Tsania Farah  
Arifin
- Sekretaris Umum : Chaezarani Hijrinalis
- Bendahara Umum : Aaliyah Davalynn
- Pemimpin Redaksi : Amellia Rachmayanti
- Redaktur Pelaksana Media Online : Dimas Irfak  
Tabrani
- Redaktur Pelaksana Artistik : Ryan Anugerah Rafael
- Redaktur Pelaksana Jurnal : Ibrena Maria Quinta  
Karo Karo
- Redaktur Pelaksana Replik Volume I : Joshua  
Samuel Tama Pangihutan Sianipar
- Redaktur Pelaksana Replik Volume II : Elvan  
Pranata Nadeak
- Redaktur Pelaksana Replik Volume III : M. Syauqi  
Najah Alqodri
- Staf Redaksi : Ainaya Namira Salwa, David  
Sebastian Tombe, Davin Farrel Novalino Nugros,  
Elvan Pranata Nadeak, Ermi Kurnia, Fionandra  
Eileen Risdiafi Putri, Joshua Samuel Tama  
Pangihutan Sianipar, Muhammad Syauqi Najah  
Alqodri, Pranatama Simanjuntak, Rio Aditya  
Ramadhan, Vincentius Nathanael Cahyadi
- Pemimpin Psdm : Arinnda Meyputri
- Staf Psdm : Anisa Kolda Kusumajati, Faqih Nuris  
Shiba, Alya Mufidah, Alda Hamidatuz Zahra, Syahrul  
Hidayat, Rutdina Handayani, Zakiya Nirmala  
Suhartoyo, Revina Dwi Putri Yulianser, Muhammad  
Rajaa' Khalillurrahman
- Pemimpin Litbang : Azarine Naila
- Staf Litbang : Muhammad Rizki Juniarto, Nabila  
Abhista Sahlaa, Fauziah Kauri Muhajir, Dela  
Rahmatul, Alya Joelyati Putri Waloejo, Mohammad  
Ikhlil Buwaithy, Josephine Rachel Eidelaine P,  
Nathanael Geraldo Simorangkir, Kezia Aprilia Siregar,  
Siti Zannuba Tasyila Faizah, Syada El Arfi Muhamihag
- Pemimpin Humas : Rahma Alfika
- Staf Humas : Erma Suryani Situmorang, Jihan Nailah  
Rahmadina, Yasmin Nabila Hanif, Dwi Akbar  
Wiratama, Abdurrahman Faiz, Chiara Khanza Tabina,  
Alya Zahra Meidiani, Pradipta Exza Rio Yudhanto,  
Aditya Parthika Tallesang, Stevanus Geraldo  
Pakpahan, Amelia Saraswati
- Pemimpin Perusahaan : Restu Adha Wahida
- Staf Perusahaan : Hasna Afifah Haris,  
SaptaNoferiantika, Akhmad Sadam Arumi,  
AnisaMahira Anandira, Amey Laila Avrilia, Annisa  
Risqi Agustin, Isabela Nur Aulia Firdaus

# Kata Pengantar

---

Sebagai bangsa yang besar, kita tidak lepas dari sejarah panjang yang telah membentuk wajah Indonesia hingga saat ini. Salah satu babak yang hingga kini masih menyisakan bekas mendalam bagi rakyat Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada tahun 1965. Peristiwa kelam ini tidak hanya mengubah struktur sosial, politik, dan tatanan kehidupan masyarakat secara fundamental, tetapi juga meninggalkan luka yang masih terasa hingga masa kini.

Replik ini kami gagas menjadi sarana untuk membuka satu persatu lapisan dari peristiwa kelam tersebut. Kami mencoba menguak satu demi satu dari berbagai sudut pandang, mulai dari akar paham komunisme yang masuk ke Indonesia, malam kelam penculikan yang mengubah arah politik bangsa, transisi kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru, hingga pembersihan ideologi kiri yang membawa dampak panjang bagi mereka yang berafiliasi. Semua itu merupakan gambaran nyata dari dinamika sejarah yang kompleks dan penuh dengan celah abu-abu, antara kebenaran yang diwariskan dan narasi yang dipertanyakan. Pada akhirnya, cara paling sehat dalam menanggapi peristiwa ini bukan dengan melupakannya, bukan juga dengan terus menyebarkan ujaran permusuhan lintas generasi melalui *framing* “anak PKI”, melainkan dengan mendudukkannya sebagai pelajaran yang dapat diperdebatkan dan didiskusikan secara terbuka, jujur, dan berbasis bukti, tanpa menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk menyerang lawan politik.

Kami segenap penulis percaya melalui penulisan Replik ini bisa memantik mahasiswa untuk dapat berpikir lebih aktif, dinamis, dan kritis, dan juga peka terhadap sejarah bangsanya sendiri, karena cepat atau lambat kita akan mewarisi tanggung jawab untuk memaknainya.

Tetapi kami segenap penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari kata sempurna dalam penulisan Replik ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap penulisan Replik ini sebagai pembelajaran dan perbaikan kedepannya.

Semoga Replik ini bisa menerangi pembaca meningkatkan wawasan dalam berbagai hal mengenai Sejarah G30S/PKI dalam masyarakat, pendidikan, sosial politik dan generasi muda masa kini, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu dalam penyusunan Replik Volume II ini. Semoga, Replik Volume II ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, melainkan mampu menjadi jendela pikiran, sumber refleksi, dan kontribusi kecil yang bermakna bagi kehidupan berbangsa.

Elvan Pranata Nadeak  
Redaktur Pelaksana

# DAFTAR ISI

---

## 01

MENGENAL KOMUNISME  
INDONESIA

1 - 7

---

## 02

MALAM KELAM YANG  
MENGUBAH ARAH POLITIK  
INDONESIA

8 - 15

---

## 03

G30S PKI : TONGGAK  
LAHIRNYA ORDE BARU

16 - 25

---

## 04

ABSENNYA ALIRAN KIRI DARI  
PANGGUNG POLITIK  
INDONESIA

26 - 30

---

## 05

BAYANGBAYANG G30S PKI:  
PEMBERSIHAN IDEOLOGI  
PAHAM KIRI

31 - 39

---

## 06

RETROSPEKTIF G30S PKI  
DALAM MASYARAKAT, PENDIDIKAN,  
SOSIAL POLITIK DAN GENERASI MUDA.

40-44

---

# MENGENAL KOMUNISME INDONESIA



Tahun 1965 menjadi salah satu titik paling kelam sekaligus paling banyak diperbincangkan dalam sejarah Indonesia modern. Di titik itu, sebuah partai politik yang lahir dari benih ideologi asing tumbuh menjadi kekuatan besar, lalu runtuh dalam sebuah tragedi berdarah yang mengubah arah bangsa.

Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak muncul dalam semalam. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang penyebaran satu paham dari benua lain, yang bertemu dengan kegelisahan sosial kaum pribumi di bawah kolonialisme, lalu tumbuh, jatuh-bangun, hingga akhirnya menemui akhir yang tragis.

Untuk memahami peristiwa Gerakan 30 September (G30S), penting terlebih dulu mengenal apa itu komunisme,

bagaimana ia sampai ke Nusantara, dan bagaimana ia berkembang di panggung politik Indonesia.

## Apa Itu Paham Komunis?

Secara sederhana, komunisme adalah ideologi dan doktrin politik-ekonomi yang menghendaki penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan digantikan dengan kepemilikan bersama, sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas sosial.

Gagasan ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Karl Marx bersama Friedrich Engels melalui karya Manifesto Komunis (1848) dan Das Kapital, sebagai kritik atas ketimpangan yang ditimbulkan sistem kapitalisme pada era Revolusi Industri di Eropa. Marx meyakini sejarah manusia digerakkan oleh pertentangan kelas, terutama antara kaum pemilik modal (borjuis) dan kaum buruh (proletar). Melalui teori materialisme historis dan dialektika, ia memprediksi kaum proletar pada akhirnya akan melakukan revolusi untuk merebut alat produksi dari tangan kaum kapitalis.

Ajaran ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Vladimir Lenin di Rusia menjadi Marxisme-Leninisme, yang menekankan pentingnya partai pelopor (vanguard party) untuk memimpin revolusi kaum buruh. Gagasan ini terbukti mampu menggerakkan sejarah dunia setelah Revolusi Bolshevik 1917 berhasil mendirikan Uni Republik Sosialis Soviet, negara pertama yang menjalankan sistem komunis, dan sejak saat itu ideologi ini menyebar luas ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah jajahan Belanda di Nusantara.

Salah satu ciri yang paling menonjol dan kelak menjadi sumber pertentangan tajam di Indonesia adalah sifat komunisme yang menempatkan agama sebagai penghambat kemajuan manusia. Karena berpijak pada materialisme, komunisme memandang keberadaan Tuhan dan kehidupan setelah kematian sebagai konsep yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga cenderung bersifat ateistik. Marx sendiri pernah menyebut agama sebagai "candu bagi rakyat", pandangan yang kelak berbenturan keras dengan masyarakat Indonesia yang religius. Selain aspek ateisme, ciri lain yang melekat pada ideologi

ini adalah penolakan terhadap hak milik pribadi atas alat produksi, penekanan pada kepemimpinan kolektif partai tunggal, serta cita-cita internasionalisme kelas pekerja yang melampaui batas-batas negara bangsa.

### **Latar Belakang Masuknya Paham Komunis ke Indonesia**

Paham komunis pertama kali dibawa masuk ke Hindia Belanda oleh seorang aktivis buruh asal Belanda, Henk Sneevliet, yang tiba di Nusantara pada awal 1913. Bersama sejumlah tokoh sosialis Belanda lainnya, ia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada tahun 1914 di Semarang. Pada mulanya organisasi ini beranggotakan orang-orang Belanda dan belum banyak menyentuh kalangan pribumi.

Kondisi sosial di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 turut menjadi lahan subur bagi tumbuhnya paham ini. Sistem tanam paksa dan eksploitasi kolonial yang berlangsung puluhan tahun menciptakan kesenjangan tajam antara kaum pemodal asing dengan buruh dan tani pribumi, kondisi yang menurut para sejarawan sangat sejalan dengan narasi pertentangan kelas yang diusung

Marxisme. Sneevliet memanfaatkan situasi ini dengan mendekati kalangan buruh kereta api dan trem yang tergabung dalam Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel (VSTP) di Semarang, sekaligus menjalin relasi dengan tokoh pergerakan pribumi bernama Semaun, yang saat itu menjabat sekretaris Sarekat Islam (SI) cabang Surabaya.

Momentum penyebaran paham ini semakin kuat setelah pecahnya Revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917, yang membuktikan bahwa kekuatan buruh dapat menggulingkan kekuasaan lama. Sneevliet kemudian mengarahkan strategi ISDV untuk menyusup ke organisasi pergerakan nasional yang sudah memiliki basis massa luas, terutama SI pimpinan Oemar Said Tjokroaminoto yang ketika itu telah memiliki jutaan anggota di seluruh Hindia Belanda. Melalui kader-kader seperti Semaun, Darsono, dan Alimin yang sekaligus menjadi anggota SI cabang Semarang, ide-ide Marxis disebarkan di kalangan buruh dan tani dengan bungkus perlawanan terhadap kapitalisme dan kolonialisme. Penyusupan ini akhirnya memecah SI menjadi 2 (dua) kubu pada Kongres SI di Madiun tahun 1923,

yakni SI Merah yang condong pada komunisme di bawah Semaun dan berpusat di Semarang, serta SI Putih yang bertahan pada garis Islam di bawah Agus Salim dan berpusat di Yogyakarta. Perpecahan inilah yang menjadi pintu masuk utama bagi paham komunis untuk memperoleh basis massa rakyat pribumi secara luas, sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai ISDV karena keanggotaannya masih didominasi orang-orang Eropa.

### **Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia**

Pada Kongres ISDV 23 Mei 1920 di gedung Sarekat Islam Semarang, organisasi ini resmi mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH), dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menegaskan identitas komunis organisasi ini secara terbuka. Empat tahun kemudian, pada 1924, nama organisasi kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), menjadikannya partai komunis pertama di Asia di luar Uni Soviet.

PKI muda ini tidak lama tampil sebagai kekuatan politik yang moderat. Pada 1926-1927, partai ini nekat melancarkan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah

kolonial Hindia Belanda di Banten, Batavia, dan Sumatra Barat, tanpa persiapan matang dan bertentangan dengan saran sejumlah tokoh senior pergerakan seperti Tan Malaka yang menilai kondisi belum matang untuk melakukan revolusi. Pemberontakan tersebut gagal total dan direspons dengan represi besar-besaran oleh pemerintah kolonial yakni ribuan anggota dan simpatisan ditangkap, sebagian dijatuhi hukuman mati, dan banyak tokohnya dibuang ke kamp pengasingan Boven Digoel di Papua. Akibatnya, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah kolonial dan nyaris lumpuh total, sehingga aktivitasnya harus dijalankan secara sembunyi-sembunyi hingga masa pendudukan Jepang berakhir dan Indonesia merdeka pada 1945.

### **Kondisi PKI Sebelum Tahun 1945**

Setelah proklamasi kemerdekaan, PKI bangkit kembali sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan. Namun pada 18 September 1948, di tengah situasi revolusi fisik melawan Belanda, tokoh PKI Musso yang baru kembali dari Uni Soviet memimpin pemberontakan di Madiun dan memproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia". Pemerintah Republik Indonesia di

bawah komando operasi Kolonel A.H. Nasution berhasil menumpas pemberontakan tersebut hanya dalam hitungan hari; Musso tewas tertembak, sementara sejumlah tokoh PKI lain ditangkap dan dieksekusi. Peristiwa yang dikenal sebagai Pemberontakan Madiun 1948 ini membuat PKI kehilangan kepercayaan publik dan hampir kehilangan seluruh kekuatannya.

Titik balik terjadi pada awal 1950-an, ketika kepemimpinan partai diambil alih oleh generasi muda di bawah Dipa Nusantara Aidit bersama Njoto, M.H. Lukman, dan Sudisman. Kepemimpinan baru ini mengubah total strategi perjuangan PKI, dari jalan kekerasan bersenjata menjadi jalan parlementer dan pembangunan organisasi massa yang masif, meliputi organisasi buruh (SOBSI), petani (BTI), pemuda (Pemuda Rakyat), perempuan (Gerwani), hingga seniman dan budayawan (Lekra).

Strategi ini terbukti berhasil: pada Pemilihan Umum 1955, PKI meraih suara signifikan dan menjadi salah satu dari 4 (empat) partai politik terbesar di Indonesia bersama PNI, Masyumi, dan NU, sekaligus tumbuh menjadi partai komunis non-pemerintah dengan jumlah anggota

terbesar di dunia pada masanya.

Sepanjang akhir 1950-an hingga awal 1960-an, kedekatan Aidit dengan Presiden Soekarno semakin mempercepat pemulihan citra dan kekuatan PKI. Melalui jaringan organisasi sayapnya yang tersebar hingga ke desa-desa, PKI berhasil membangun basis massa yang sangat luas di kalangan petani penggarap dan buruh perkebunan, kelompok masyarakat yang sebelumnya jarang tersentuh oleh partai-partai politik lain. Kondisi inilah yang menempatkan PKI dalam posisi tawar politik yang kuat menjelang meletusnya peristiwa G30S pada 1965.

### **Pergerakan PKI pada Tahun 1965**

Memasuki pertengahan dekade 1960-an, posisi PKI dalam konstelasi politik nasional semakin kuat berkat kedekatannya dengan Presiden Soekarno dalam kerangka Demokrasi Terpimpin dan ideologi NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis).

Namun, kekuatan yang membesar ini berhadapan langsung dengan kecurigaan dan penolakan dari Angkatan Darat, yang menolak gagasan PKI untuk membentuk "Angkatan Kelima" berupa buruh dan tani bersenjata di luar struktur militer

resmi. Ketegangan antara PKI dan TNI-AD ini memuncak seiring beredarnya isu adanya "Dewan Jenderal" yang disebut-sebut berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno.

Di tengah situasi itu, sejak November 1964 PKI diketahui membentuk Biro Khusus di bawah koordinasi Kamaruzaman bin Sjam Kamaruzaman, yang bertugas menjalin hubungan dengan sejumlah perwira militer yang bersimpati kepada partai. Ketegangan tersebut berujung pada dini hari 1 Oktober 1965, ketika sekelompok pasukan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung dari Resimen Cakrabirawa bergerak menculik sejumlah perwira tinggi TNI-AD. Enam jenderal, yakni Ahmad Yani, R. Soeprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswomiharjo beserta seorang perwira pertama, Lettu Pierre Tendean, dibunuh dan jenazahnya dibuang ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Gerakan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September ini kemudian mengumumkan pembentukan "Dewan Revolusi" untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan.

Dalam waktu singkat, gerakan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan PKI sekaligus mengantarkan pergantian tampuk kepemimpinan nasional.

### **Pengaruh Paham Komunis pada Periode 1959 -1965**

Sepanjang masa Demokrasi Terpimpin, konsep NASAKOM yang digagas Soekarno pada praktiknya memberi ruang gerak yang luas bagi PKI untuk masuk ke jantung birokrasi negara, lembaga legislatif, hingga jajaran komando militer. PKI memanfaatkan momentum ini secara maksimal untuk memperluas pengaruhnya melalui organisasi-organisasi sayapnya di berbagai sektor kehidupan, mulai dari kebudayaan lewat Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), pertanian lewat Barisan Tani Indonesia, hingga serikat buruh lewat SOBSI.

Kedekatan Soekarno dengan PKI turut memicu polarisasi tajam dalam politik nasional. Kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan haluan NASAKOM, seperti

Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), dibubarkan oleh pemerintah, sementara kekuatan politik Islam arus utama secara bertahap termarginalkan dari pusat kekuasaan. Di sisi lain, hubungan segitiga antara Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat berjalan dalam keseimbangan yang rapuh: PKI membutuhkan payung politik Soekarno untuk terus berkembang, sementara Soekarno memanfaatkan PKI sebagai penyeimbang kekuatan militer. Keseimbangan yang rapuh inilah yang pada akhirnya pecah dalam tragedi G30S, dan berujung pada pembubaran resmi PKI beserta larangan penyebaran ideologi Marxisme-Leninisme dan komunisme di seluruh wilayah Indonesia melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, sebuah ketetapan yang hingga kini masih berlaku dalam sistem hukum nasional.

Perjalanan komunisme di Indonesia adalah kisah tentang bagaimana sebuah ideologi impor dapat tumbuh subur di tengah ketimpangan sosial akibat kolonialisme, mengalami pasang surut akibat pemberontakan dan represi, hingga akhirnya berujung pada tragedi kemanusiaan yang mengubah wajah politik Indonesia untuk selamanya. Bahwasanya memahami akar sejarah ini penting, bukan untuk membuka luka lama, melainkan agar generasi muda dapat mengambil pelajaran dari dinamika ideologi dan kekuasaan yang pernah membawa bangsa ini ke titik yang sangat rentan.

**Penulis: Faqih Nuris Shiba**

# Malam Kelam Yang Mengubah Arah Politik Indonesia



<https://www.republika.id/posts/32517/kekejaman-pki-dari-masa-ke-masa>

peristiwa menjadi sejarah yang tidak bisa dilupakan. Salah satunya yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Pemerintah Indonesia yang saat itu belum bisa menuntaskan tindakan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) terpaksa melepas kaum kiri yang sebelumnya menjadi tawanan. Salah satunya adalah Dipa Nusantara Aidit atau sekarang dikenal dengan D. N. Aidit. DN Aidit merupakan seorang komunis yang sempat menjadi pemimpin PKI dan di bawah kepemimpinannya, Aidit berhasil membawa PKI masuk ke

dalam sistem parlementer dengan anggota yang mencapai angka tiga juta. Angka tersebut diisi oleh kelompok mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu yaitu buruh dan tani. Berhasilnya PKI dalam menggandeng para buruh dan tani membuat PKI menjadi partai yang tidak bisa diremehkan.

PKI selain sebagai partai formal juga menggandeng beberapa organisasi masyarakat (Ormas) seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh



<https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6312951/sejarah-g30s-pki-latar-belakang-tujuan-dan-kronologi>

Seluruh Indonesia (SOBSI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Pemuda Rakyat, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Selain melalui ormas, PKI juga melakukan tindakan turun tangan ke daerah-daerah kecil dengan membawa kader yang menyebarkan ideologi komunisme. Terdapat tiga tokoh yang berperan penting dalam jalannya PKI yaitu D. N. Aidit sebagai ketua PKI yang berhasil membawa PKI ke masa kejayaannya, M. H. Lukman dan Lukman Njoto sebagai dua tokoh yang membantu Aidit dengan membentuk "Triumvirat" yaitu pimpinan muda PKI, Musso dan Amir Syarifuddin sebagai senior sebelumnya yang menyusun pergerakan dalam peristiwa Madiun 1948.

Pada masa itu, PKI menjadi partai keempat terbesar di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai fraksi-fraksi politik yang apabila disimpulkan terdapat tiga ideologi utama yaitu Nasionalisme, Agama, Komunisme (NASAKOM). Ideologi tersebut menciptakan konflik politik ditambah dengan pengaruh dua blok yaitu blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet dan China). Puncak dari konflik tersebut adalah G30S PKI. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan PKI untuk menjatuhkan pemerintahan Soekarno yang saat itu sedang berkuasa. PKI ingin menjatuhkan Soekarno karena komunisme yang diyakini oleh pemerintah dan yang diyakini oleh PKI beda terutama dalam implementasinya ditambah dengan kondisi

kesehatan Soekarno yang menimbulkan kekhawatiran. Pada awal Agustus 1965, Soekarno sempat pingsan setelah berpidato. Momen tersebut memunculkan banyak persepsi terutama secara politik tentang siapa yang akan menggantikan Soekarno.

Selain itu juga dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan PKI yang telah berlangsung lama karena TNI menganggap bahwa PKI hanya menguntungkan diri sendiri. Ada desas-desus tentang adanya sekelompok Jenderal yang ingin meng kudeta Soekarno bernama Dewan Jenderal sehingga Letnan Kolonel Untung membentuk sekelompok pasukan untuk menculik Dewan Jenderal yaitu Jenderal A.H. Nasution, Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen Ahmad Sukendro.

Gerakan 30 September atau semula bernama Operasi Takari terjadi selama dua hari satu malam yaitu pada malam tanggal 30 September hingga dini hari

1 Oktober. Letnan Kolonel Untung dari Komando Batalion I Kawal Resimen Cakrabirawa (Pasukan Khusus Pengawal Presiden) memimpin gerakan dengan menunjuk Lettu Dul Arief menjadi ketua pelaksana penculikan. Pada malam 30 September, pasukan pasopati merencanakan tindakan dan mengatur koordinasi dengan membentuk eksekutor dengan membentuk satuan tugas (satgas) yaitu Satgas Pasopati, Satgas Bimasakti dan Satgas Pringgodani. Satgas Pasopati mempunyai tugas utama untuk melakukan terhadap enam Jenderal yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Satgas Bimasakti bertugas untuk menguasai titik-titik strategis di Jakarta seperti pusat telekomunikasi dan Radio Republik Indonesia. Satgas Pringgodani bertugas mengamankan daerah kelurahan Lubang Buaya. Pada dini hari tanggal 1 Oktober, pasukan pasopati bergerak menuju kediaman tiap-tiap jenderal yang



<https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/01/174500365/kronologi-penemuan-7-pahlawan-revolusi-korban-g30s-di-lubang-buaya?page=all>

sudah menjadi target yaitu Jenderal A.H. Nasution, Letnan Jenderal (Letjen) Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen Ahmad Sukendro. Delapan Jenderal yang menjadi target hanya 7 yang berada di Jakarta. Brigjen Ahmad Sukendro sedang melaksanakan tugas negara di Tiongkok atas utusan Presiden Soekarno. Saat pasukan yang dipimpin oleh Mukidjan tiba di kediaman Letjen Ahmad Yani, para pasukan menyampaikan bahwa sang Jenderal diminta untuk menghadap Presiden Soekarno. Ahmad Yani meminta agar bisa bersiap-siap terlebih dahulu namun pasukan menolak dan mengatakan tidak perlu. Terjadi perlawanan karena Ahmad Yani menolak untuk ikut. Ahmad Yani sebagai target pertama kemudian ditembak dan terbunuh dalam aksi penculikan

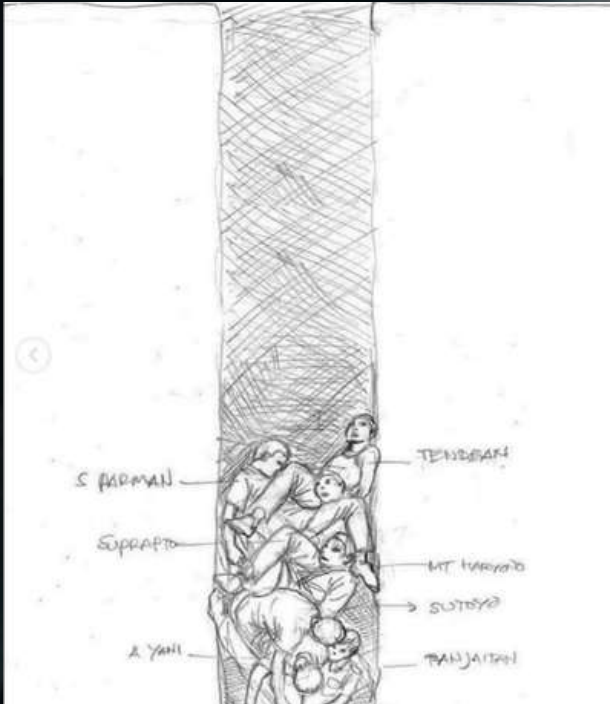
tersebut. Operasi yang awalnya berniat untuk melakukan penculikan/penjemputan berubah menjadi aksi pembunuhan. Setelah dari kediaman Ahmad Yani, pasukan segera menuju kediaman Mayor Jenderal R. Soeparto. Pasukan dipimpin oleh Serda Sulaiman. Sesampainya pasukan di kediaman Soeparto, pasukan mengatakan hal yang sama seperti kepada Ahmad Yani bahwa jenderal diminta menghadap Presiden Soekarno. Soeparto dibawa dalam keadaan hidup menuju lubang buaya. Pasukan yang dipimpin oleh Serma Bungkus menuju kediaman Mayor Jenderal M. T. Hartono dan mengatakan hal yang sama dengan Jenderal sebelumnya. Hartono sempat mencurigai kedatangan pasukan tersebut dan sempat melakukan perlawanan namun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Hartono akhirnya dibawa ke Lubang Buaya. Pasukan yang dipimpin oleh Serma Satar menuju kediaman Mayor Jenderal S. Parman. Pasukan mengatakan hal yang sama bahwa Parman diminta untuk menghadap Presiden Soekarno. Istri Parman sudah curiga dengan kedatangan pasukan tersebut. Parman

berhasil dibawa dalam keadaan hidup-hidup dan dibawa ke Lubang Buaya. Pasukan menuju kediaman Brigadir Jenderal D. I. Panjaitan dipimpin oleh Serda Sukardjo. Panjaitan yang merupakan seorang beragama Katolik sempat berdoa terlebih dahulu sebelum keluar rumah untuk menghadap pasukan yang kemudian ditembak hingga mati. Pasukan kemudian mendatangi kediaman Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo yang dipimpin oleh Serma Surnono. Sutoyo tidak melakukan perlawanan dan dibawa pasukan hidup-hidup menuju lubang buaya. Jenderal A. H. Nasution merupakan salah satu target utama dalam operasi ini namun gagal diculik. Pasukan yang telah tiba di kediaman Nasution menyadari bahwa Nasution melarikan diri melalui belakang rumahnya. Dalam proses pelariannya, pasukan menembaki Nasution namun tidak ada satupun yang terkena dan justru timah panas yang ditujukan ke Nasution mendarat di putri Nasution, Ade Irma Suryani Nasution. Nasution yang masih dikejar pasukan berhasil melarikan diri namun dikarenakan kondisi gelap akhirnya pasukan menembak

Lettu Pierre Andreas Tendean ditembak karena dikira merupakan Nasution.

Setelah operasi selesai dilaksanakan, pasukan kemudian berkumpul di Lubang Buaya dengan kondisi para Jenderal sebagian sudah meninggal dan sebagian masih hidup. Jenderal yang masih hidup kebingungan karena dikira akan bertemu dengan Presiden Soekarno. Setelah semua target yang berhasil dibawa dibunuh, pasukan kemudian membuang jenazah kedalam sumur tua di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah yang terdiri dari enam Jenderal dan satu Perwira kemudian dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi bertumpuk dengan posisi kaki berada di atas dan posisi kepala berada di bagian bawah.

Setelah Operasi Takari tuntas dilaksanakan, masyarakat digemparkan dengan informasi bahwa beberapa Jenderal dinyatakan menghilang. Pemerintah kala itu segera mengerahkan pasukan untuk melakukan pencarian terhadap



Jenderal yang hilang. Pasca kejadian ini terdapat petunjuk penting dalam ditemukannya sumur tua tempat dibuangnya jenazah enam Jenderal dan satu Perwira. Petunjuk penting adalah seorang Brigadir Polisi Sukitman. Pada 1 Oktober, Sukitman menjadi salah satu orang yang ikut ditangkap oleh pasukan pasopati, namun berhasil melarikan diri. Sukitman melarikan diri ke Markas Komando Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Sukitman segera memberikan informasi bahwa jenazah berada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada tanggal 3 Oktober, pasukan RPKAD segera melakukan penelusuran di daerah Lubang

Buaya. Pasukan RPKAD melakukan penyisiran pada wilayah tersebut untuk menemukan jenazah para korban. Para pasukan kerap menemukan gundukan tanah yang dicurigai sebagai tempat mengubur jenazah namun, hasilnya tidak memuaskan. Setelah lama mencari akhirnya, muncul seorang warga yang menunjukkan tempat lain yaitu sumur tua di bawah pohon pisang yang sudah disamarkan. Saat para warga dan pasukan menggali, tercium bau busuk dan kemudian ditemukan jenazah para korban di kedalaman 12 meter.

Penemuan jenazah tersebut segera dilaporkan kepada Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan evakuasi yang dilakukan oleh pasukan penyelam Korps Komando Angkatan Laut (KKO). Setidaknya terdapat 11 orang yang melakukan evakuasi pengangkatan jenazah tersebut yaitu Purnawirawan Pembantu Letnan Marinir Dua Sugimin, Winanto, Sutarto, Saparimin, J. Kandouw, A. Sudardjo, Hartono, Samuri, I. Subekti, dokter gigi Baharudin Sumarno, dan dokter

tentara Kho Tjioe Liong. Proses pengangkatan jenazah tersebut diperkirakan berlangsung pada pukul 11.00 dan berakhir pada pukul 15.00. Tujuh Korban Gerakan 30 September yang terdiri dari enam Jenderal dan satu Perwira kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi. Pada tanggal 5 Oktober, ketujuh korban dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pasca peristiwa ini, Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto segera melakukan tindakan untuk memadamkan pemberontakan. Pemburuan para pelaku G30S mencapai titik melibatkan masyarakat. PKI dituduh sebagai dalang dibalik operasi ini. Sebagian tokoh PKI kemudian ditangkap dan diadili Mahkamah Militer Luar Biasa dengan sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI, DN Aidit yang dituding merencanakan operasi ini bersama ketua biro khusus PKI kemudian melarikan diri ke Jawa Tengah dan berhasil ditangkap dan dibunuh. Selain perburuan terhadap PKI, namun juga terhadap “yang diduga sebagai PKI” entah itu merupakan simpatisan atau bahkan yang bukan PKI.



Markas Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta, pada 8 Oktober, hancur lebur oleh amukan massa, menyusul Peristiwa G30S. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-1451322>

Penangkapan besar-besaran dilakukan terhadap diduga berkaitan dengan PKI seperti para anggota organisasi-organisasi yang diidentikan komunis, seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan lain-lain. Penangkapan tersebut disertai dengan kekerasan hingga pembunuhan tidak hanya terjadi Jakarta namun juga di daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra, dan wilayah lain. Tindakan semena-mena ini terjadi pada rentang tahun 1965 hingga 1966 dengan perkiraan korban jiwa mencapai 500.000. Dalam konteks kestabilan negara, pada masa tersebut sangatlah tidak stabil terutama dalam hal keamanan karena siapapun dapat

dibunuh tanpa proses hukum yang adil.

Secara politik kekuasaan, Presiden Soekarno tetap berpegang teguh dengan gagasannya yaitu Nasakom. Namun setelah peristiwa G30S PKI, posisi PKI runtuh dan posisi Angkatan Darat meningkat drastis. Dalam kondisi ini kekuasaan Soekarno sangat tidak diuntungkan atau melemah. Selama masa tersebut juga muncul beberapa gerakan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menuntut perubahan politik dan ekonomi Tritura. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat atau Tiga Tuntutan Rakyat adalah tuntutan rakyat yang berupa pembubaran PKI, Pergantian Kabinet Dwikora dari unsur unsur komunis, dan perbaikan ekonomi. Dengan kondisi itulah Soeharto dan Angkatan Darat mempunyai posisi tawar yang sangat kuat. Pada tanggal 11 Maret 1966, terjadi demonstrasi besar di Jakarta yang kemudian tiga Jenderal besar Basuki Rachmat, Muhammad Jusuf, dan Amir Machmud bertemu dengan Soekarno. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno memberikan instruksi kepada Ketiga Jenderal besar tersebut untuk mengatasi situasi yang tidak stabil dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Pada hari itulah kekuasaan Soekarno runtuh dan digantikan oleh Soeharto.

**Penulis: Vincentius Nathanael Cahyadi**

## G30S PKI Tonggak Lahirnya Orde Baru

Sistem politik di Indonesia yang sekarang ini tidak luput dari banyaknya peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Setiap peristiwa yang terjadi mengukir sejarah dan memberikan pelajaran untuk kedepannya sistem politik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Setelah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan, tibalah waktu yang ditunggu. Tepat pukul 5 pagi kala itu proklamasi tanda bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan resmi dibacakan. Isak tangis dan sorak bahagia terdengar riuh kala itu. Namun perjuangan bangsa Indonesia tidak selesai pada saat itu, perjuangan kami masih berlanjut. Setelah proklamasi kemerdekaan, Langkah pertama yang diambil sebagai sebuah negara baru, ialah merancang sistem politik. Politik penting sebagai pondasi dan arah laju negara.

Sistem politik di Indonesia yang sekarang ini tidak luput dari banyaknya peristiwa yang terjadi pada masa lampau.



<https://geotimes.id/opini/g30s-pki-komunisme-dan-rekayasa-sejarah-orde-baru/>

Setiap peristiwa yang terjadi mengukir sejarah dan memberikan pelajaran untuk kedepannya sistem politik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Setelah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan, tibalah waktu yang ditunggu. Tepat pukul 5 pagi kala itu proklamasi tanda bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan resmi dibacakan. Isak tangis dan sorak bahagia terdengar riuh kala itu. Namun perjuangan bangsa Indonesia tidak selesai pada saat itu, perjuangan kami masih berlanjut. Setelah proklamasi kemerdekaan, Langkah pertama yang diambil sebagai sebuah negara baru, ialah merancang sistem politik. Politik penting sebagai pondasi dan arah laju negara.

Sistem politik pertama yang diadopsi oleh negara Indonesia adalah politik yang berciri parlementer yang didasarkan dari UUD 1945. UUD 1945 sendiri

menganut akan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahannya. Namun, sistem ini bergeser ke arah parlementer setelah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X (16 Oktober 1945) yang memberi wewenang legislatif kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang akhirnya mengubah sistem pemerintahan menjadi kabinet parlementer. Sejak saat itu, kabinet bertanggung jawab kepada KNIP (yang berfungsi sementara menjadi parlemen), bukan lagi kepada presiden. Presiden pada saat itu, Soekarno hanya diposisikan sebagai simbol negara tidak lagi sebagai kepala pemerintahan.

Penerapan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan tidak berlangsung dengan tenang. Belanda pada saat itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih berusaha untuk menjajah Kembali melalui Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948). Untuk mengakhiri peristiwa tersebut, maka diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus – 2 November tahun 1949 dihadiri perwakilan Indonesia (Moh. Hatta, Moh. Roem, Soepomo), Belanda dan. Dari Konferensi Meja Bundar tersebut lahirlah sebuah

kesepakatan, bahwa Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia apabila Indonesia berbentuk negara federal atau negara bagian dari Belanda dan Ratu Belanda menjadi kepala negara. Pengakuan oleh Belanda tersebut dilakukan paling lambat 30 Desember 1949. Baru setelahnya pada 27 Desember 1949 Belanda resmi memberikan penyerahan kedaulatan kepada RIS. Akibat dari adanya perubahan bentuk negara ini maka Indonesia membutuhkan konstitusi baru yang sesuai, sehingga lahirlah Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang berlaku pada 27 Desember 1949. Konstitusi ini menetapkan sistem parlementer dengan presiden RIS berkedudukan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada DPR RIS. tidak berlangsung dengan tenang. Belanda pada saat itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih berusaha untuk menjajah Kembali melalui Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948). Untuk mengakhiri peristiwa tersebut, maka diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus – 2 November tahun 1949 dihadiri perwakilan Indonesia (Moh. Hatta, Moh. Roem, Soepomo), Belanda dan. Dari

Konferensi Meja Bundar tersebut lahirlah sebuah kesepakatan, bahwa Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia apabila Indonesia berbentuk negara federal atau negara bagian dari Belanda dan Ratu Belanda menjadi kepala negara. Pengakuan oleh Belanda tersebut dilakukan paling lambat 30 Desember 1949. Baru setelahnya pada 27 Desember 1949 Belanda resmi memberikan penyerahan kedaulatan kepada RIS. Akibat dari adanya perubahan bentuk negara ini maka Indonesia membutuhkan konstitusi baru yang sesuai, sehingga lahirlah Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang berlaku pada 27 Desember 1949. Konstitusi ini menetapkan sistem parlementer dengan presiden RIS berkedudukan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada DPR RIS. Rakyat Indonesia pada saat itu banyak yang kecewa dan tidak puas dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), sehingga memunculkan gagasan untuk mempersatukan kembali Republik Indonesia. Semangat untuk mengembalikan kedaulatan negara menimbulkan perubahan. Dengan dimulainya

negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) satu per satu bubar dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950 Indonesia resmi bersatu kembali dan mulai diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dari UUDS 1950 sistem pemerintahan yang dianut tetap pada sistem parlementer dengan tambahan sistem multi partai, diantaranya PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sistem multipartai tersebut melahirkan kabinet-kabinet pemerintahan yang dibentuk lewat koalisi antar partai. Namun karena seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan, program-program pembangunan nasional menjadi terhambat. Dengan kondisi politik yang kurang stabil tersebut, di bawah pimpinan kabinet Burhanuddin Harahap diadakan pemilu/pemilihan umum pertama yang dilaksanakan dengan dua tahap. Tahap pertama (29 September 1955) memilih anggota DPR dan tahap kedua (15 Desember 1955) memilih anggota konstituante/ lembaga yang bertugas menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950. Setelah selesai dengan pemilu, lembaga konstituante yang ditugaskan menyusun UUD baru untuk pengganti UUDS 1950 dianggap tidak sesuai, karena

memunculkan perdebatan besar yang berakhir pada kebuntuan. Setelah selesai dengan pemilu, lembaga konstituante yang ditugaskan menyusun UUD baru untuk pengganti UUDS 1950 dianggap tidak sesuai, karena memunculkan perdebatan besar yang berakhir pada kebuntuan. Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menyatakan akan bubarnya lembaga konstituante sekaligus menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai dasar hukum negara dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sebagai lembaga pengganti. Keluarnya dekrit ini juga menandai berakhirnya sistem parlementer dan masuknya era Demokrasi Terpimpin dengan sistem presidensial di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa ini, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan dimana Presiden Soekarno mengenalkan sebuah konsep baru, yakni konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) konsep yang dibawa dengan harapan mempersatukan kubu-kubu partai besar. Melalui konsep inilah partai

Komunis Indonesia (PKI) yang sebelumnya hanya salah satu bagian dari partai di Indonesia mulai mendapat pengakuan dan ruang gerak yang lebih luas, sehingga pengaruhnya pada pemerintahan sepanjang tahun 1960 an terasa hingga saat ini. Untuk memahami lebih jauh bagaimana ideologi komunis bisa mendapatkan ruang gerak yang sedemikian luas dalam sistem politik Indonesia, perlu ditelusuri terlebih dahulu konsep yang menjadi pintu masuknya, yaitu NASAKOM. Konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis) merupakan ideologi yang dilahirkan oleh presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno. Pada saat itu Soekarno mencetuskan konsep ini dengan tujuan menyatukan unsur nasionalisme, agama dan komunisme yang hidup pada saat itu. Perlu diingat bahwa unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang sejak dulu ada sehingga, tujuan dari Soekarno mencetuskan konsep NASAKOM supaya tercipta keserasian dalam menyokong bangsa dan negara Indonesia. Pemikiran Soekarno tentang konsep NASAKOM telah tercermin jauh sebelum era demokrasi terpimpin, tepatnya sejak tahun 1926 saat ia menulis sebuah artikel tentang persatuan tiga unsur utama Gerakan pra-kemerdekaan, yaitu nasionalisme, islamisme, dan marxisme. Hal ini menunjukkan

bahwa gagasan Nasakom bukan sekedar reaksi dalam era demokrasi terpimpin melainkan buah pemikiran yang telah lama dipendam Soekarno untuk mempersatukan tiga unsur yang hidup berdampingan sejak masa pergerakan nasional dan ketiganya sama-sama pernah merasakan pahitnya penindasan. Kaum nasionalis dalam kekangan penjajah, kaum agama yang menginginkan kebebasan beragama, serta kaum komunis yang tertindas terutama yang berada pada kelas bawah.

Gagasan NASAKOM baru benar-benar terwujud secara nyata dalam struktur kekuasaan setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil bangkit kembali pasca pemberontakan Madiun pada 1948. Meski pemberontakan tersebut berhasil membuat PKI kehilangan banyak tokoh, namun PKI tidak dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, sehingga dapat tetap memiliki ruang untuk tumbuh. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit sejak 1951 PKI mengubah orientasi politiknya dari yang sebelumnya ada pada jalan revolusioner yang ditempuh Musso, menjadi jalan legal parlementer dengan merangkul golongan non komunis seperti PNI

dan NU, sembari tetap memandangi Masyumi dan PSI sebagai kekuatan borjuis. Strategi perubahan jalannya politik tersebut membuahkan hasil, terbukti dari jumlah anggota partai yang meningkat pesat dari sekitar 165 ribu pada awal tahun 1954 menjadi satu juta orang pada akhir tahun 1955. Sehingga PKI menjadi partai keempat terbesar dalam Pemilu 1955 dengan perolehan sekitar 16% suara. Dari pencapaian tersebut menjadi modal bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya dengan menyusup ke berbagai lini sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dalam bidang eksekutif, PKI berhasil menempatkan Njoto sebagai bagian dari Kabinet Dwikora, sekaligus menempatkan kader-kadernya sebagai kepala daerah di sejumlah wilayah seperti Cilacap, Boyolali, dan Karanganyar.

Dalam ruang kepartaian PKI juga melakukan penyusupan ke tubuh partai lain seperti PNI dan Partindo hingga berhasil mengubah pemaknaan ideologi Marhaenisme PNI menjadi lebih selaras dengan Marxisme. Dalam jalur komunikasi, PKI berhasil menduduki Lembaga Kantor Berita Nasional Antara serta organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tak hanya itu, PKI juga mulai memasuki ranah militer dengan melakukan pembentukan Biro Khusus yang bertugas secara rahasia untuk menanamkan

pengaruh komunisme di kalangan ABRI yang menjadi awal mula pecahnya Gerakan 30 September 1965. Meletusnya peristiwa G30S PKI kemudian menjadi titik balik yang membuka lembaran baru dalam sejarah politik Indonesia, yaitu era pembersihan ideologi komunis di Indonesia. Peristiwa tersebut bermula dari penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh perwira tinggi Angkatan Darat pada dini hari 1 Oktober 1965 oleh pasukan yang menamakan diri dengan Gerakan 30 September. Pasukan tersebut kemudian membawa para korban ke kawasan Lubang Buaya untuk disiksa dan dibunuh. Di antara korban tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat sehingga menimbulkan kekosongan komando Angkatan Darat. Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada saat itu mengambil alih komando sementara dan memerintahkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk merebut kembali Gedung Telekomunikasi dan RRI yang sebelumnya telah dikuasai PKI dan segera melancarkan operasi penumpasan menyeluruh terhadap PKI beserta orang-orang yang diduga

Meletusnya peristiwa G30S PKI kemudian menjadi titik balik yang membuka lembaran baru dalam sejarah politik Indonesia, yaitu era pembersihan ideologi komunis di Indonesia. Peristiwa tersebut bermula dari penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh perwira tinggi Angkatan Darat pada dini hari 1 Oktober 1965 oleh pasukan yang menamakan diri dengan Gerakan 30 September. Pasukan tersebut kemudian membawa para korban ke kawasan Lubang Buaya untuk disiksa dan dibunuh. Di antara korban tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat sehingga menimbulkan kekosongan komando Angkatan Darat. Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada saat itu mengambil alih komando sementara dan memerintahkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk merebut kembali Gedung Telekomunikasi dan RRI yang sebelumnya telah dikuasai PKI dan segera melancarkan operasi penumpasan menyeluruh terhadap PKI beserta orang-orang yang diduga terkait dengan PKI. Operasi ini kemudian meluas ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali untuk melumpuhkan basis-basis PKI bahkan para pemuda NU (Nahdlatul Ulama) ikut bergabung

menjadi kekuatan pendukung operasi pembersihan PKI.

Pembersihan tersebut berlangsung hingga tahun 1966 dan menelan korban dalam jumlah yang sangat besar, dengan berbagai sumber menyebutkan korban menyentuh angka jutaan jiwa, sementara ratusan ribu lainnya ditangkap dan dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan. Dampak dari pembersihan ideologi komunisme PKI tidak berhenti pada generasi yang terlibat langsung tetapi juga pada keturunan dari PKI tersebut. Hal tersebut terlihat pada penerapan status eks-Tapol (mantan tahanan politik) yang dicantumkan dalam kartu tanda penduduk sehingga menimbulkan diskriminasi berupa sulitnya mengakses pekerjaan sebagai PNS, TNI/Polri maupun profesi lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Demi memastikan pengaruh PKI benar-benar sudah bersih dari tubuh militer, pemerintah pada saat itu menerapkan sistem screening atau Tes Penelitian Khusus (Litsus) bagi setiap calon anggota militer beserta keluarganya, bahkan berlaku pula pada calon istri prajurit agar memastikan tidak adanya keterkaitan dengan PKI.

Diluar upaya pembersihan ideologi komunis dan pada peristiwa berdarah, adanya peristiwa G30S PKI juga membawa konsekuensi politik yang besar, yakni bergesernya pusat kekuasaan negara dari tangan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto melalui peristiwa yang bermula dari keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Peristiwa G30S PKI situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia semakin memburuk sehingga memunculkan gelombang aksi yang menuntut diselesaikannya peristiwa tersebut. Gerakan aksi pada saat itu dipelopori oleh berbagai kesatuan seperti KAMI, KAPI, KAGI, KAWI, dan KABI. Pada Oktober 1965 kesatuan-kesatuan tersebut menyatu membentuk perkumpulan yang disebut Front Pancasila. Gerakan ini kemudian melahirkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) pada tahun 12 1966. Salah satu isi dari tuntutan tersebut adalah menuntut untuk pembubaran PKI. Namun Presiden Soekarno tidak langsung memenuhi tuntutan tersebut, melainkan melakukan perombakan atau pergantian cabinet menjadi kabinet yang disebut Kabinet Dwikora Disempurnakan yang dalam kabinet tersebut diisi oleh tokoh-tokoh yang dianggap pro-PKI sehingga menimbulkan kemarahan dari masyarakat. Ketegangan tersebut memuncak pada 24 Februari

1966, ketika mahasiswa yang berupaya menghalangi pelantikan kabinet baru mengalami bentrok dengan Pasukan Cakrabirawa (Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno) dan menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, pada 10 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Front Pancasila serta perwakilan partai politik, namun tidak membuahkan hasil. Dari kebuntuan tersebut Jenderal Soeharto mengutus tiga jenderal untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor dengan upaya menawarkan pemulihan keadaan yang berujung pada terbentuknya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat tersebut berisi perintah tentang pemberian wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk mengatasi keadaan bahaya. Keluarnya Supersemar ini kemudian menimbulkan dualisme kepemimpinan dari Soekarno dan Soeharto. Dengan ini menandakan beralihnya pemerintahan Orde Lama menuju pemerintahan Orde Baru. Dengan itu dilaksanakanlah Sidang Umum MPRS ke-IV yang berlangsung pada 20 Juni sampai dengan 5 Juli

1966 di tengah berlangsungnya sidang tersebut pada 22 Juli 1966 Presiden Soekarno diminta menyampaikan pertanggungjawaban atas peristiwa-peristiwa selama Demokrasi Terpimpin melalui pidato yang diberi nama Nawaksara, namun isinya dinilai tidak memuaskan. Selanjutnya Sidang Umum akhirnya ditutup dan dari sidang tersebut menghasilkan ketetapan akan pengukuhan Supersemar serta pemberian wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru dengan Soekarno masih menjabat sebagai presidennya. Kemudian Soeharto dengan itu segera membentuk kabinet yang dinamai Kabinet Ampera pada 28 Juli 1966 dengan tugas pokok menjalankan Dwi Dharma (stabilitas politik dan ekonomi) serta program Catur Karya. Ketidakpuasan terhadap pidato Nawaksara tersebut akhirnya membuat Presiden Soekarno menyampaikan kembali pidato pelengkap nyapada 10 Januari 1967, dengan desakan yang terus menguat akhirnya Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto pada 20 Februari 1967. Hingga pencabutan jabatan Soekarno dan pelimpahan jabatan presiden kepada Soeharto dengan resmi dilakukan pada Sidang Istimewa MPRS pada 22 Februari 1967. Beralihnya kekuasaan tersebut

menandai titik awal terbentuknya struktur pemerintahan serta orientasi negara yang baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru oleh presiden Soeharto fokus utama dalam kepemimpinannya ialah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena pada akhir era Orde Lama kondisi perekonomian nasional lumpuh akibat adanya hiperinflasi serta kekosongan kas negara. Pemulihan ekonomi diutamakan untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan sekaligus menjadi instrumen utama untuk memperoleh legitimasi politik dari masyarakat. Selain itu pada masa Orde Baru terjadi pula perpindahan haluan politik luar negeri yang condong ke arah barat, dengan upaya mendapat aliran dana yang membuat pemerintah mematuhi agenda stabilisasi ekonomi makro serta membuka ruang besar bagi investor-investor asing.

Corak baru pun muncul pada berjalannya pemerintahan Orde Baru, yakni corak kekuasaan otoritarianisme birokratik yang memiliki tiga kekuatan utama, yaitu lembaga kepresidenan, militer dan birokrasi. Lembaga kepresidenan bertugas memegang kendali tertinggi sebagai pusat politik nasional serta

penentu arah kebijakan pembangunan, militer menjalankan fungsi ganda (dwifungsi) sebagai alat pengamanan stabilitas negara, dan birokrasi yang bertindak sebagai pelaksana administrasi negara. Selain itu demi mencegah polarisasi dan kekuatan oposisi yang dapat menghambat jalannya pembangunan, pemerintah Orde Baru menerapkan sistem kontrol politik melalui korporatis negara, dimana berbagai organisasi kemasyarakatan dihimpun dalam wadah tunggal di bawah pengawasan ketat pemerintah. Berdasarkan seluruh rangkaian Panjang mengenai perjalanan sistem politik Indonesia mulai dari masa awal setelah kemerdekaan sampai masa Orde Baru maka dapat disimpulkan bahwa dinamika politik Indonesia mengalami transformasi yang sangat panjang dan berliku sejak masa kemerdekaan hingga lahirnya Orde Baru. Perubahan sistem pemerintahan mulai dari sistem parlementer pada awal kemerdekaan, beralih ke Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang diwarnai oleh pengaruh konsep NASAKOM, hingga puncaknya pada peristiwa tragis G30S/PKI tahun 1965, telah mengubah arah peta politik nasional secara drastis. Peristiwa G30S/PKI tidak hanya menjadi titik balik berupa pembersihan total terhadap unsur-

unsur komunisme di Indonesia, tetapi juga menjadi momentum pergeseran kekuasaan besar-besaran dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto melalui dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Era Orde Baru kemudian hadir dengan corak kekuasaan otoritarianisme birokratik yang menitikberatkan fokus pada stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi. Dari rangkaian sejarah tersebut, terlihat jelas bahwa setiap fase politik di Indonesia saling berkaitan dan meninggalkan pelajaran berharga mengenai pentingnya stabilitas, penegakan hukum, serta kedewasaan dalam berdemokrasi.

**Penulis: Amelia Saraswati**

## Absennya Aliran Kiri dari Panggung Politik Indonesia

Apabila hendak mempertanyakan mengapa aliran kiri tidak hadir pada panggung politik Indonesia, kita terlebih dahulu perlu memahami apa yang pernah terjadi secara garis besar. Perlu kita ingat bahwa 'aliran kiri' tidak selamanya menghilang dari iklim politik Indonesia. Faktanya, Indonesia pada masanya menjadikan 'aliran kiri', dalam konteks ini komunisme, sebagai salah satu pilar utama dalam tatanan politik Indonesia, hal ini tertuang pada prinsip politik milik Ir. Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia pada waktu itu (masa Demokrasi Terpimpin) yang disebut "NASAKOM" yang mana merupakan akronim dari Nasionalisme, Agama, Komunisme.

Hal ini tercermin pada partai-partai besar yang memenangkan pemilu tahun 1955, antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mana ke-empat partai tersebut memang memeluk salah satu prinsip utama yang tercantum pada ideologi



<https://kota-tegal.kpu.go.id/page/read/sejarah-pemilu>

NASAKOM. PNI dengan nasionalisme, NU dan Masyumi dengan agama, kemudian PKI dengan komunismenya.

Kemudian, percepat waktu menuju 30 September 1965. Seketika PKI dibubarkan dan paham komunisme dinyatakan sebagai ideologi terlarang. Semua orang yang pernah mengikuti atau terafiliasi dengan PKI, dinyatakan sebagai kriminal dan harus 'dibasmi' hingga ke akar-akarnya. Panggung politik Indonesia yang sebelumnya terdiri dari tiga paham politik berkurang menjadi 2 (dua), menyisakan paham nasionalisme dan agama beserta partai-partai politik yang menganutnya. Lantas, diusirnya komunisme dari kehidupan politik sehari-hari Indonesia apakah karena murni disebabkan oleh trauma historis yang mengerikan, ataukah memang komunisme tidak sesuai dengan kepribadian panggung politik Indonesia?

Hal ini dapat dikaji dari 3 (tiga) sudut pandang untuk mengatakan bahwa komunisme memang tidak dapat diimplementasikan, yaitu dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dari segi filosofis, Indonesia menganut satu ideologi mutlak yaitu Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan *staatsfundamentalnorm*,

yang berdasarkan teori Hans Nawiasky berarti norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, sehingga Pancasila merupakan puncak tertinggi segala hal dalam negara termasuk seluruh iklim politiknya, meskipun partai-partai politiknya menspesifikasikan ke salah satu prinsip tertentu seperti nasionalisme dan agama. Mengutip dari *mpr.go.id*, eksistensi PKI mencederai sila pertama karena dalam ideologi komunisme tersebut cenderung ateistik dan tidak mengakui keberadaan Tuhan, sehingga secara otomatis bertentangan dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Tuduhan ateisme ini tentunya bukan merupakan fitnah semata apabila dilihat dari akar mula lahirnya paham komunisme, tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels secara eksplisit mencela agama dan pemeluk-pemeluk agama. Karl Marx sendiri berpendapat bahwa "agama adalah candu bagi masyarakat", kemudian Friedrich Engels dalam karyanya "*Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy*" secara eksplisit menentang segala bentuk metafisika atau penciptaan supranatural seperti eksistensi Tuhan dan roh.

Aspek filosofis lainnya yang mendukung tidak cocoknya komunisme di Indonesia adalah tujuan ideal komunisme untuk menciptakan classless and stateless society atau peradaban tanpa kelas dan tanpa negara. Hal ini akan menjarak pada pelanggaran sila ke-empat Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah dan demokrasi. Pemusnahan sistem kelas memerlukan sebuah transisi, yang mana secara praktik dan sejarah yang ada, seluruh peradaban yang mencoba mengimplementasikan komunisme akan terjatuh ke lubang pemerintahan totalitarian dan kediktatoran. Hal ini dikarenakan proses transisi tersebut memerlukan kendali penuh oleh diktator proletariat untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan demi kelas pekerja.



<https://www.antaranews.com/berita/5749777/sejarah-pki-di-indonesia-dari-madiun-1948-hingga-g30s-1965#:~:text=terjadi%20penculikan%20dan%20pembunuhan>

Kemudian absennya komunisme di Indonesia secara sosiologis dapat dilihat dari kejadian historis yang terjadi pasca tragedi 30 September 1965. Oleh karena tragedi tersebut, masyarakat Indonesia mengusung Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang beberapa isinya adalah pembubaran PKI dan penghapusan segala ormas yang terafiliasi dengannya, beserta perombakan Kabinet Dwikora yang masih diisi oleh orang-orang dari PKI dan simpatisannya. Pada akhirnya, tuntutan tersebut dikabulkan dan diikuti dengan bubarnya masa Demokrasi Terpimpin dan menghadirkan masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto setelah dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang sependapat bahwa PKI tidak pantas untuk diintegrasikan dalam iklim politik Indonesia.



<https://tirto.id/isi-tap-mprs-no-25-1966-terkait-pki-apa-saja-yang-dilarang-gwEn>

Searah dengan asas *"vox populi vox Dei"* bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, pembubaran PKI dan penghapusan paham komunisme itu sendiri sudah benar dan bersifat demokratis karena searah dengan keinginan rakyat. Kebetulan saja pemerintah pada saat itu sedang demokratis dan benar-benar mendengarkan keinginan rakyat.

Tidak lama setelah pemerintahan Orde Baru berdiri, muncul TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menjadi dasar yuridis pembubaran PKI dan menjadikannya organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, serta menyatakan larangan untuk penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Ketetapan MPR tersebut terdiri dari 4 (empat) pasal, yang mana dalam isinya juga termasuk melarang berbagai institusi pendidikan seperti pada universitas untuk mempelajari secara ilmiah paham komunisme dengan maksud untuk mempertahankan ideologi Pancasila.

Selain TAP MPR, hingga saat ini tertuang pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas dan eksplisit masih melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme atau marxisme-leninisme disertai dengan paham-paham lain yang dapat mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara baik dengan media lisan maupun cetak, hal ini pun juga dipertegas dengan ancaman pidana penjara terhadap orang yang melakukannya.



<https://tirto.id/aksi-pelarian-pki-madiun-di-kabupaten-gunungkidul-gBzC>

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka sudah semestinya semua kegiatan kewarganegaraan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dari hal ini, tentunya sudah pasti praktik komunisme tidak ada lagi di iklim politik Indonesia dikarenakan secara hukum telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan seperti yang termaktub pada TAP MPR serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka sudah semestinya semua kegiatan kewarganegaraan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dari hal ini, tentunya sudah pasti praktik komunisme tidak ada lagi di iklim politik Indonesia dikarenakan secara hukum telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan seperti yang termaktub pada TAP MPR serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila dilihat dari berbagai partai politik yang eksis di Indonesia saat ini, semuanya mengusung pemahaman seragam tentang Pancasila, kebhinekaan, kesejahteraan yang merata, dan nasionalisme ataupun agama, tanpa adanya perbedaan yang ekstrim antara partai-partai. Apabila seketika muncul partai politik yang mengusung paham sosialis, meskipun non-komunis, hal itu pun akan dianggap tabu akibat stigma paham kiri sama dengan komunisme. Padahal kenyataannya paham kiri tetap eksis pada saat ini, namun tidak dalam wujud komunisme. Mengutip dari *bpika.uma.ac.id*, paham kiri dalam politik adalah pandangan politik yang cenderung progresif, mengedepankan kesejahteraan sosial, keadilan, dan menghapus ketimpangan pada masyarakat. Hampir semua agenda politik di Indonesia mendukung hal tersebut dan tertuang pada partai politik serta ormas-ormas yang hidup saat ini.

Mengambil contoh paham marhaenisme yang sampai sekarang masih diajarkan dan dituangkan dalam organisasi akademisi, atau Indonesia yang sampai saat ini masih mengakui Hari Buruh Sedunia setiap tanggal 1 Mei dengan menggaungkan lagu '*Internationale*' yang merupakan bentuk dukungan kaum buruh dunia dan merupakan warisan dari paham sosialisme. Hal ini dapat dijadikan kesimpulan bahwa paham kiri sosialisme non-komunis masih tidak sepenuhnya mati dalam panggung politik Indonesia.

Sejatinya Indonesia memang mendukung kesetaraan, kesejahteraan yang merata, tidak adanya diskriminasi agama maupun ras dan suku oleh seluruh agenda partai politiknya. Namun hal ini pula juga membuat iklim politik Indonesia menjadi monoton dengan tidak adanya perbedaan substantif antara partai politik, sehingga mengakibatkan kemenangan politik hanya berdasarkan popularitas dan kuantitas. Hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi politik, dengan diskusi dan dialektika yang terbatas pada persetujuan bersama, tanpa adanya oposisi yang kuat atau kritik yang membangun. Akibatnya terlihat pada kepentingan rakyat yang seringkali terpinggirkan demi kepentingan kelompok atau individu tertentu yang menguasai politik melalui popularitas dan kesepakatan awal.



<https://www.magnific.com/idn/foto/diskusi-kelompok>

Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat yang mana terlihat jelas terdapat partai sayap kanan konservatif dan partai sayap kiri sosialis-progresif yang saling bertentangan ideologi. Di Indonesia, partai-partai politik mengacu pada ideologi sentris yang menggabungkan semua kebutuhan masyarakat Indonesia dan menjadikannya agenda politik sesuai dengan kepribadian bangsa yang beragam. Pada dasarnya memang panggung politik Indonesia memerlukan sedikit ruang agar paham kiri non-komunis dapat berkembang di antara seragamnya ideologi-ideologi partai politik dengan agendanya yang seragam pula. Hal ini tentunya bertujuan untuk memecah monotonitas dinamika politik Indonesia dan menambah substansi politik selama tetap menghindari agar tidak bercondong menuju komunisme.

Karena apabila Indonesia jatuh ke tangan komunisme, lantas tidak ada yang menjamin bahwa Indonesia tidak akan berakhir seperti Rusia dan Tiongkok yang dipenuhi perang saudara, atau Vietnam dan Korea Utara yang berakhir perang melawan negara-negara barat, atau Kamboja yang berakhir dengan pembunuhan massal warga negaranya sendiri.

**Penulis : Gola Arpanji Cahyono**

# Bayang-Bayang G30S PKI: Pembersihan Ideologi Paham Kiri



Sumber: BBC News

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi perubahan besar dalam situasi politik dan keamanan nasional.

Angkatan Darat di bawah Mayjen Soeharto bergerak untuk menguasai keadaan, sementara Partai Komunis Indonesia (PKI) kemudian dinyatakan berada di balik gerakan tersebut. Para tokoh PKI diburu dan ditangkap, sebagian diadili melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), dan sebagian dijatuhi hukuman berat. Pada saat yang sama, penumpasan tidak hanya diarahkan kepada tokoh-tokoh PKI, tetapi meluas kepada orang-orang yang dianggap sebagai anggota, simpatisan, maupun pihak yang mempunyai hubungan dengan PKI atau organisasi yang diidentikkan dengan komunisme.

Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan fenomena kriminalisasi terhadap

orang-orang yang berafiliasi atau dianggap berhubungan dengan PKI. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara keanggotaan organisasi, hubungan sosial atau keluarga, dan perbuatan pidana yang benar-benar dilakukan oleh seseorang.



Sumber: Arsip KOMPAS

Dalam praktik penumpasan 1965-1966, sasaran tidak selalu terbatas pada orang yang dapat dibuktikan sebagai anggota PKI. Label “PKI” dapat dikenakan kepada orang yang dianggap sebagai simpatisan, mempunyai hubungan dengan organisasi yang berafiliasi dengan PKI, mempunyai pandangan politik kiri, atau bahkan hanya dituduh memiliki hubungan dengan komunisme. Akibatnya, batas antara seseorang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan dengan seseorang yang sekadar dianggap mempunyai identitas atau hubungan tertentu menjadi kabur. Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai Peristiwa 1965-1966 memperlihatkan bahwa rangkaian penumpasan tersebut disertai berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

BBC mencatat bahwa terjadi penangkapan besar-besaran terhadap anggota maupun orang yang dianggap sebagai simpatisan atau terkait PKI, termasuk mereka yang berasal dari organisasi yang diidentikkan dengan gerakan komunis seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Konsentrasi Gerakan

Mahasiswa Indonesia (CGMI), Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Sejumlah laporan yang dikutip BBC bahkan memperkirakan jumlah orang yang terbunuh mencapai sekitar 500.000 orang di berbagai daerah, terutama Jawa dan Bali, sementara puluhan ribu lainnya ditahan dan sebagian dibuang ke Pulau Buru tanpa melalui proses pengadilan.

Penyebutan organisasi-organisasi serta orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI perlu ditempatkan secara hati-hati, karena tidak selalu berarti bahwa setiap anggota organisasi atau orang-orang tersebut merupakan anggota PKI atau secara individual melakukan tindakan yang sama dengan PKI. Dalam konteks inilah, muncul persoalan *guilt by association*, yaitu kecenderungan menghubungkan kesalahan seseorang dengan kelompok atau orang lain hanya berdasarkan hubungan sosial maupun organisasi. Secara hukum, persoalan tersebut sangat penting karena pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya harus dikaitkan dengan perbuatan orang yang bersangkutan, seseorang tidak semestinya dianggap melakukan suatu tindak pidana hanya karena ia memiliki hubungan keluarga, pernah menjadi anggota suatu organisasi, atau mempunyai latar belakang tertentu tanpa adanya pembuktian mengenai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Lalu, sejauh mana suatu tindakan dapat disebut penyebaran ideologi komunis? Dalam perkembangan hukum Indonesia, terdapat perbedaan antara mempelajari suatu ideologi sebagai objek ilmu pengetahuan dengan menyebarkan atau mengembangkan ideologi tersebut. Bahkan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 sendiri masih membuka ruang bagi kegiatan mempelajari Komunisme/*Marxisme-Leninisme* secara ilmiah dalam rangka mengamankan Pancasila. Artinya, terdapat pengakuan bahwa pengetahuan mengenai suatu ideologi dan tindakan untuk menyebarkan ideologi tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

Karena itu, hubungan seseorang dengan sejarah PKI juga tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan menyebarkan komunisme. Misalnya, orang yang mempelajari sejarah PKI, melakukan penelitian mengenai Peristiwa 1965 dan

sebagainya tidak dapat disamakan dengan orang yang secara aktif melakukan kegiatan untuk menyebarkan ideologi tersebut. Perbedaan ini penting karena tanpa parameter yang jelas, larangan terhadap suatu ideologi dapat bergeser dari larangan terhadap perbuatan tertentu menjadi larangan terhadap identitas tertentu. Dengan demikian, parameter yang relevan adalah perbuatan konkret yang dilakukan individu tersebut bukan hubungan historis atau hubungan darah.

Proses pelarangan tersebut kemudian memperoleh dasar politik dan hukum yang semakin kuat melalui Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Ketetapan yang disahkan pada 5 Juli 1966 tersebut membubarkan PKI, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, serta melarang kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme. TAP tersebut memiliki dua sasaran yang berbeda pertama, PKI sebagai organisasi, dan kedua, aktivitas penyebaran serta pengembangan ideologi Komunisme Marxisme-Leninisme.



Istilah “peredupan komunisme” dapat dipahami sebagai proses politik dan hukum yang mempersempit ruang keberadaan komunisme dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 menjadi salah satu fondasi penting dari proses tersebut karena secara formal memberikan legitimasi terhadap pembubaran PKI dan pelarangan kegiatan penyebaran maupun pengembangan Komunisme Marxisme-leninisme, tetapi hal tersebut berbeda dari pemberian kewenangan tanpa batas untuk memperlakukan setiap individu yang memiliki hubungan dengan



Sumber: BBC News

PKI sebagai pelaku tindak pidana. Perbedaan antara organisasi, ideologi, dan pertanggungjawaban individu menjadi penting, terutama ketika membahas dampak sosial dari kebijakan anti komunisme.

Pembedaan tersebut semakin penting apabila TAP ini ditempatkan dalam konteks Peristiwa 1965–1966. Komnas HAM mencatat bahwa Peristiwa 1965–1966 diikuti oleh berbagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI, termasuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, pemindahan penduduk secara paksa, serta pelanggaran HAM lainnya. Komnas HAM juga menempatkan Peristiwa ini sebagai salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965–1966 yang disusun oleh Komnas HAM.

Akan tetapi, perlu dibedakan antara kebijakan negara mengenai pelarangan secara eksplisit yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dengan berbagai kekerasan yang terjadi dalam rangkaian Peristiwa 1965-1966. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 ditetapkan pada 5 Juli 1966, sedangkan kekerasan massal telah berlangsung sejak setelah Peristiwa 30 September 1965. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh kekerasan 1965-1966 dikatakan sebagai tindakan yang “diperintahkan” atau “dilegalkan” oleh TAP tersebut. Hubungan antara kebijakan negara, aparat, kelompok masyarakat, dan kekerasan yang terjadi pada periode tersebut merupakan persoalan sejarah dan hukum HAM yang lebih kompleks.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, rangkaian kekerasan 1965-1966 dikategorikan sebagai peristiwa yang mengandung dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara meluas dan sistematis. Penumpasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme penangkapan atau tindakan administratif terhadap PKI, tetapi juga berkembang menjadi operasi keamanan, penahanan

dalam jumlah besar, serta kekerasan terhadap masyarakat yang dianggap memiliki hubungan dengan komunisme. Penelitian pada periode ini menunjukkan bahwa aparat militer memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya kekerasan, meskipun bentuk dan tingkat keterlibatannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dalam kondisi ini, penting untuk memahami bahwa kekuatan negara tidak hanya bekerja melalui tindakan langsung aparat, tetapi juga melalui kemampuan negara untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengendalikan kelompok yang dianggap sebagai musuh politik. Aparat negara memiliki kewenangan terhadap struktur pemerintahan sampai tingkat daerah, informasi mengenai organisasi dan individu yang dianggap berkaitan dengan PKI, serta melakukan penangkapan dan penahanan.

Pada sejumlah wilayah, kelompok–kelompok masyarakat juga dilibatkan dan dimobilisasi dalam proses penumpasan PKI, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keterlibatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui konfrontasi langsung, tetapi juga dalam bentuk penjagaan keamanan, pengidentifikasian orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI, penangkapan, serta tindakan penumpasan terhadap mereka. Salah satu kelompok yang tercatat terlibat adalah Gerakan Pemuda Ansor di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan kanor pada masa itu terdiri atas 25 desa dan terdapat anggota maupun simpatisan PKI di berbagai desa. Pada awalnya, keberadaan mereka tidak selalu menimbulkan konflik terbuka dengan masyarakat, tetapi ketegangan kemudian berkembang seiring aktivitas politik dan organisasi yang berafiliasi dengan PKI.

Salah satu bentuk ketegangan yang terjadi adalah gangguan terhadap kegiatan yang diselenggarakan kelompok NU, seperti upaya menerobos barisan ketika NU mengadakan pertemuan, persoalan agraria khususnya pelaksanaan aksi sepihak dalam konteks landreform yang memperbesar persaingan dan ketegangan antar kelompok di masyarakat. Situasi tersebut mencapai eskalasi setelah Peristiwa 30 September 1965, ketika tuduhan keterlibatan PKI dalam G30S, pemberitaan mengenai gerakan tersebut, serta meningkatnya seruan untuk melakukan penindakan terhadap PKI memperkuat rasa takut, kemarahan

dan kecurigaan masyarakat terhadap anggota maupun simpatisannya. Kondisi ini kemudian mendorong mobilisasi kelompok-kelompok masyarakat termasuk GP Ansor, untuk melakukan penjagaan, penangkapan terhadap orang yang dianggap terkait dengan PKI, dan tindakan penumpasan.

Selain di Bojonegoro, pembantaian PKI juga dilakukan di Lumajang, Jawa Timur. Menurut saksi yang bertugas sebagai anggota Pertahanan Sipil (Hansip) di dusunnya, menjelang proses pembantaian, mushola dan masjid dipenuhi oleh warga yang ketakutan. Disebutkan bahwa pelaku pembantaian PKI tidak hanya Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang berada dibawah naungan Ansor, melainkan juga sejumlah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi, anggota dan tersangka PKI diangkut menggunakan truk dan digiring ke bantaran sungai di Srebet, dalam kondisi kedua tangan disilangkan ke belakang dan kedua ibu jari diikat dengan benang, mereka dibunuh. Menurut saksi, jasad mereka dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sudah dipersiapkan di dekat sungai itu.

Operasi pembantaian juga terjadi di Bali, yaitu dimulai pada 7 Desember 1965. Saat Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin oleh Mayor Djasmin mendarat di Bali. Akan tetapi sebelum kehadiran RPKAD di Bali, situasi di Pulau Dewata itu sudah tegang, sebab segerombolan anti komunis menyerang dan membakar habis rumah-rumah anggota PKI, kemudian beberapa anggota PKI juga ditangkap, sedangkan sebagiannya memilih untuk menyerahkan diri ke polisi untuk mendapat perlindungan. Sesampainya RPKAD di Bali, target pertama jatuh pada salah satu donatur *Central* Daerah Besar PKI Bali, yaitu I Gede Poeger, ia bersama beberapa pemimpin dan anggota PKI di Bali, yaitu Ketut Kandel sebagai sekretaris Central Daerah Besar (CBD) PKI di Bali, Anom Dada sebagai anggota/staf CBD PKI Bali, Bandem Wirka sebagai anggota CBD PKI Bali, dan Ida Bagus Warjana sebagai editor surat kabar PKI Fajar bersama-sama dieksekusi pada 16 Desember 1965. Kala itu, pasukan RPKAD diperkirakan telah membunuh sekitar 30 orang PKI di Bali.

Sejak Oktober 1965 hingga pertengahan tahun 1966, diperkirakan sekitar 1,5 juta anggota PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya dibunuh, lalu sekitar 1 juta orang lainnya ditahan tanpa pernah diadili. Kendati demikian,

jumlah korban tewas yang akurat dan terverifikasi masih belum diketahui sampai saat ini. Sebelum pembunuhan selesai, Angkatan Darat Indonesia memperkirakan korban tewas sebanyak 78.500, sedangkan PKI memperkirakan angkanya mencapai dua juta orang.

Tidak hanya korban, keluarga korban juga turut mengalami diskriminasi karena dituduh sebagai keluarga PKI. Selain harus kehilangan pekerjaan, banyak juga di antara mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah, dikucilkan dari lingkungan, hingga kesulitan mendapat pekerjaan. Salah satu warisan yang paling panjang adalah stigma yang diterima oleh keluarga dan keturunan para penyintas. Artikel BBC mengenai keluarga penyintas 1965 menunjukkan bagaimana label tersebut dapat terus memengaruhi kehidupan seseorang bahkan puluhan tahun setelah peristiwa terjadi.

Artikel BBC mengangkat pengalaman Pipit Ambarmirah seorang anak dari mantan tahanan politik 1965, yang baru mengetahui ketika mendekati usia 17 tahun bahwa kedua orang tuanya merupakan mantan tahanan politik 1965. Selama bertahun-tahun, kedua orang tuanya menyembunyikan masa lalu tersebut karena kekhawatiran bahwa anak-anak mereka akan ikut terkena dampak stigma yang diletakan kepada keluarga mereka. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, Pipit mengaku terkejut dengan hal tersebut dan merasa dirinya berbeda dan lebih rendah dari orang lain.

Pipit menyampaikan bahwa ia mendapat gambaran menyeramkan tentang PKI dan bahkan dirinya ikut membenci PKI. Stigma tersebut berkembang dalam konteks politik Orde Baru yang membangun narasi tertentu mengenai peristiwa pergerakan PKI dan menempatkan PKI sebagai musuh negara. Pembentukan ingatan tersebut adalah film “Pengkhianatan G30S/PKI”, yang diproduksi oleh pemerintah Orde Baru pada 1984 dan selama bertahun-tahun ditayangkan secara wajib melalui berbagai saluran televisi.

Film tersebut membentuk persepsi sosial mengenai siapa yang dianggap sebagai “komunis” dan siapa yang harus dicurigai. Film tersebut menggambarkan PKI secara antagonistik dan menempatkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S, sehingga dalam jangka panjang

narasi tersebut dapat berkontribusi terhadap terbentuknya ketakutan dan stigma terhadap segala sesuatu yang diasosiasikan dengan PKI. Stigma-stigma lain juga ikut dibentuk melalui pendidikan, media, simbol-simbol negara serta praktik politik dan sosial yang membatasi kelompok yang dianggap berafiliasi dengan komunisme.

Lebih jauh, BBC juga memberitakan pengalaman penyintas mengenai pendataan yang menurut mereka masih membedakan keluarga penyintas dari masyarakat lainnya. Pipit menceritakan informasi mengenai sebuah buku data di tingkat kecamatan yang tidak hanya mencatat penyintas, tetapi juga informasi mengenai pasangan, anak, dan sekolah anak. Kesaksian tersebut menggambarkan bagaimana masa lalu seseorang dapat tetap memengaruhi kehidupan anggota keluarganya bahkan setelah orang tersebut selesai menjalani masa tahanannya.

Hal ini memperlihatkan apa yang dapat disebut “dosa turunan” secara sosial, bukan dalam arti bahwa kesalahan hukum benar-benar diwariskan kepada anak, tetapi bahwa stigma dan konsekuensi sosial dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

**Penulis: Alya Joelyati Putri Waloejo**

## Retrospektif

## G30S PKI

dalam

Masyarakat,

Pendidikan,

Sosial, Politik, dan

Generasi Muda



Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunisme Indonesia merupakan peristiwa kelam yang merenggut nyawa tujuh (7) jenderal dan dua (2) perwira. Melalui pembantaian yang amat kejam, menjadikan peristiwa ini patut untuk dikenang sepanjang masa. Monumen Pancasila Sakti merupakan salah satu situs memori yang berfungsi sebagai media simbolik yang mengikat ingatan masa lalu mengenai peristiwa G30S PKI. Tujuan dari dibangunnya monumen ini adalah mengenang perjuangan pahlawan revolusi serta mengkonstruksi narasi bahwa PKI (Partai Komunisme Indonesia) adalah musuh negara yang mengancam kedaulatan ideologi Pancasila. Selain itu, setiap bulan September media nasional rutin memberitakan kembali mengenai sejarah G30S PKI dan komunisme sebagai bahan diskursus

nasional setiap tahunnya. Kilas balik film Pengkhianatan G30S PKI juga menjadi salah satu media untuk memperkuat hukum anti komunisme sebagai alat peredam budaya yang memaksa masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi informasi digital dan komunikasi, semakin mempermudah penyebaran berita melalui pencarian dengan kata kunci “PKI” dan “G30S”. Topik tersebut meningkat signifikan selama bulan September setiap tahunnya sejak tahun 2017.

Peristiwa G30S juga dapat mempengaruhi dunia pendidikan, siswa dapat mempelajari peristiwa ini melalui mata pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), yang masuk sejak kurikulum tahun 1984 yang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan

menanamkan ideologi Pancasila secara komprehensif. Kemudian, pada tahun 1994 pemerintah Orde Baru melakukan rekonstruksi terhadap kurikulum dengan menyelaraskan narasi peran heroik militer yang menumpas G30S PKI sebagai tindakan yang bermoral. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2013 yang memaparkan tujuh teori tentang G30S PKI antara lain: PKI sebagai dalang utama, persoalan internal angkatan darat, CIA (Central Intelligence Agency) sebagai badan intelijen Amerika Serikat, Soekarno sebagai dalang, keterlibatan Soeharto, keterlibatan Tiongkok, teori chaos (kekacauan tanpa aktor tunggal). Pada bulan Maret 2007, Kejaksaan Agung menerbitkan surat yang berisi pengecaman terhadap buku sejarah yang tidak mencantumkan narasi Orde Baru di dalamnya yang merujuk pada peristiwa 1965. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keterkaitan Soeharto sebagai dalang pembantaian, namun, di dalamnya masih terdapat korban, pelaku dan aksi heroik sebagai makna moral halus yang masih harus dipertahankan.

Pengaruh peristiwa G30S PKI terhadap politik adalah landasan hukum dan stigmatisasi yang terdapat dalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang

mengandung 3 (tiga) mandat utama yakni pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI, dan larangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Munculnya TAP MPRS XXV merupakan produk kepentingan politik yang membawa peristiwa pembantaian kelam yang menyangkal perlindungan HAM yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E (3) bahwasanya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali, kemudian berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, serta berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adanya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan stigmatisasi struktural yang membatasi kebebasan berideologi, menjangkau kehidupan akademik dan menimbulkan ketegangan berkelanjutan dengan hak asasi manusia dan konstitusi. Narasi kebangkitan PKI sering dikaitkan dengan Pemilu yaitu digunakan sebagai alat framing politik untuk

menyerang lawan. Dalam Pemilu 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo sering dianggap sebagai simpatisan PKI dan kandidat komunis. Framing kebangkitan PKI menciptakan efek traumatis yang mendalam, sehingga dapat dengan mudah digunakan sebagai senjata paling ampuh untuk menjatuhkan lawan dengan mendiskreditkan lawan.

Pengaruh G30S PKI terhadap kehidupan sosial budaya antara lain mengenai pembuatan film pengkhianatan G30S PKI yang membawa propaganda dalam memonopoli sejarah dalam orde baru sehingga membawa kesan PKI yang biadab dan khianat. Film Pengkhianatan G30S PKI yang ditayangkan tiap tahunnya setiap bulan September ini memberikan dampak berupa trauma kolektif masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keturunan mantan anggota PKI menghadapi diskriminasi sosial melalui pendidikan dan pekerjaan, walaupun kebanyakan dari mereka tidak terlihat secara langsung. Namun muncul stigma negatif dari masyarakat yaitu para keturunan mantan anggota PKI dianggap mewarisi sifat radikal dari leluhurnya berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa mengungkap latar belakang keturunan PKI sudah cukup

untuk memicu prasangka dan penilaian negatif terhadap seseorang. Label sebagai keturunan mantan PKI menyebabkan penurunan akan rasa kebanggaan dan evaluasi negatif, sehingga hal ini memunculkan stigma sebagai seorang keturunan kriminal. Negara menerapkan berbagai pembatasan hukum dan birokrasi terhadap orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI, termasuk sebagian keturunannya. Pembatasan tersebut dapat menyulitkan mereka dalam memperoleh dokumen, izin, pekerjaan tertentu, pendidikan, atau melakukan perjalanan ke luar negeri.

Bagi generasi muda memiliki pengetahuan tentang G30S PKI terhenti pada garis besar seperti apa yang diajarkan di sekolah seperti PKI mengkhianati bangsa, pembantaian 7 (tujuh) pahlawan revolusi, dan aksi heroik penyelamatan negara. Hingga kini pertanyaan mendasar mengenai siapa dalang peristiwa kelam ini dan sejauh mana organisasi ini terlibat masih menjadi perdebatan panjang. Generasi muda hanya mewarisi kesimpulan mengenai vonis sejarah yang diajarkan sebelum fakta-faktanya sempat diuji secara terbuka. Hal ini menjadikan generasi muda menarik kesimpulan sejarah tanpa pernah

benar-benar menelusurinya sendiri, generasi muda hanya mendapatkan fakta bias yang belum tentu kebenarannya. Walaupun pemutaran film pengkhianatan G30S PKI setiap tahun, buku sejarah yang terus-menerus ditulis ulang membuat pendidikan sejarah yang lemah dan merekayasa ingatan kolektif untuk generasi yang tumbuh di bawahnya.

Media sosial merupakan sebuah ruang digital yang menjadi ladang subur disinformasi dari 2 (dua) arah sekaligus, yaitu di satu sisi muncul sebuah konten yang meromantisasi PKI tanpa mengetahui kekerasan dan represi yang menjadi bagian dari komunisme. Disisi lain muncul konten di waktu tertentu yang mendaur ulang ketakutan gaya orde baru terhadap kebangkitan PKI. Konten-konten tersebut menyasar generasi muda yang cenderung tinggi dalam literasi digital namun rendah dalam literasi sejarah. Persoalan yang muncul pada saat ini adalah bukan bagaimana generasi muda perlu menghafal lebih banyak nama, tanggal, bulan, tahun dari peristiwa G30S PKI tetapi adalah bagaimana generasi muda dapat membuat kerangka berpikir historis yang runtut yaitu kemampuan untuk memahami bahwa sejarah kekerasan politik jarang memiliki satu narasi

tunggal yang bersih. Sumber resmi negara tidak otomatis netral, bahwa aksi yang dianggap heroik tetap perlu diingat bahwa belum tentu menyebut seseorang sebagai penyelamat.

G30S PKI bukan hanya peristiwa sejarah yang telah usai dibahas, melainkan ingatan yang terus di politisasi hingga saat ini. Memori kolektif mengenai peristiwa tersebut masih terus menjadi alat kekuasaan hingga saat ini bukan hanya sekedar catatan yang netral. Selama negara dan elit politik masih mendapatkan keuntungan dari mempertahankan hal tersebut, maka rekonsiliasi sejati sulit tercapai sebab apabila mengakhiri kontroversi berarti kehilangan senjata retorika yang efektif.

Generasi muda sendiri sudah menunjukkan sikap skeptis yang positif terhadap narasi tunggal orde baru. Ditandai dengan munculnya berbagai media literasi digital yang sangat canggih dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Pada akhirnya, cara paling sehat dalam menanggapi peristiwa ini bukan dengan melupakannya, bukan juga dengan terus menyebarkan ujaran permusuhan lintas generasi melalui framing “anak PKI”, melainkan dengan mendudukkannya sebagai pelajaran

pelajaran yang dapat diperdebatkan dan didiskusikan secara terbuka, jujur, dan berbasis bukti, tanpa menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk menyerang lawan politik.

**Penulis: Amey Laila Avrilia**